

ALASAN ISLANDIA MENARIK PROPOSAL KEANGOTAAN UNI EROPA TAHUN 2015

Lia Melyana¹

***Abstract:** After the financial crisis hit the country Iceland decided to submit a membership proposal to join the European Union in 2009, negotiation continued until 2010, the European Union host began to open negotiations regarding Icelandic membership in adjusting terms and laws to join the European Union. But in 2013 Iceland began to halt all negotiations and postponed proposals for accession to the European Union until 2015, Icelandia officially withdrew its membership proposal. This then raises the question why Iceland should withdraw its proposal even though the chances of Iceland being accepted into the European Union are very large. The study uses an explanative method, which data are taken from books, Journal, websites and valid news. The author uses the concept from William D. Coplin on Decision Maker. The results of this study indicate that the reasons Iceland withdrew the European Union membership proposal was due to a change of leadership and the ruling party at the time, then the Icelandic economic condition had begun to improve so that Iceland chose to cancel the proposal.*

***Key Word :** Iceland, membership proposal, European Union*

Pendahuluan

Hubungan kerjasama ekonomi antara Islandia dengan Eropa sudah terjalin sejak 1 Januari 1970. Dimulai dengan keterlibatan Islandia dalam organisasi perdagangan bebas Eropa salah satunya yaitu European Free Trade Area (EFTA), forum ini merupakan forum perdagangan bebas pertama yang ditandatangani Islandia pasca runtuhnya kekuatan korporatis yang ada di Islandia. (efta.com, 2013).

Kerjasama negara-negara kawasan Eropa ini terus berkembang hingga tahun 1991, dimana anggota EFTA, dan EEC melakukan pertemuan di Luxemburg mengusulkan dibentuknya organisasi perdagangan bebas yang baru namun dengan struktur peraturan yang lebih lengkap. Islandia secara resmi bergabung dalam kerjasama European Economic Area (EEA) pada tahun 1994. Perjanjian EEA merupakan kerjasama ekonomi antara Uni Eropa beserta anggota-anggota EFTA dan EEC yang bertujuan untuk membentuk sebuah pasar bersama dengan prinsip empat kebebasan, yaitu pergerakan bebas orang, bebas barang, jasa dan modal. (Sukmika Mardalena et al., 2015).

Keangotaan dalam EEA memberikan Islandia akses untuk bergabung dalam pasar Internal Uni Eropa, setelah Islandia memenuhi syarat dan mengadopsi peraturan hukum yang ditetapkan Uni Eropa. Akses ke pasar tunggal Uni Eropa dapat dilakukan melalui perjanjian EEA. Namun memiliki batasan-batasan yang jelas daripada anggota penuh Uni Eropa, status non anggota menyebabkan Islandia tidak memiliki kontak langsung dengan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Lhia.meymey@gmail.com

badan-badan Uni Eropa, sebab kerjasama EEA hanya memfasilitasi Islandia dengan konsultasi via email dalam memberikan Instruksi terkait kebijakan. Sebaliknya Keanggotaan Uni Eropa dapat memberi fasilitas konsultasi secara reguler dan rutin, yang dapat membantu negara yang memiliki institusional yang terbatas untuk mendapat konsultasi. (Hilmar Hilmarsson, 2006).

Kerjasama Economic Area telah membantu keadaan ekonomi Islandia, dengan akses ke pasar Internasional seperti pasar tunggal Uni Eropa adalah hal yang sangat penting bagi negara pengekspor seperti Islandia, Hampir 83% dari semua barang ekspor Islandia ditujukan ke pasar Internal Uni Eropa melalui perjanjian ini. dengan meningkatnya permintaan ekspor terutama pada produk hasil laut yang telah menjadi salah satu penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar bagi Islandia sebesar 12%. Kemudian perusahaan manufaktur yang berorientasi ekspor terus meningkat pada tahun 2007 khususnya peleburan aluminium dan telah menyumbang sekitar 39% dari total ekspor barang. (Sukmika Mardalena Op.Cit, 2015)

Kerjasama ekonomi Islandia melalui perjanjian EEA dianggap sudah cukup bagi Islandia, dikarenakan keanggotaan penuh dalam Uni Eropa dianggap hanya akan mengakibatkan keterbatasan kedaulatan dimana Islandia akan kehilangan kontrol perikanan dan pertaniannya yang harus dibagi dengan negara-negara anggota UE. Hal ini lah yang membawa Islandia memilih untuk tetap bertahan dalam perjanjian EEA ketimbang menjadi anggota penuh Uni Eropa. Namun pada tahun 2008 krisis keuangan melanda Islandia yang merupakan dampak dari krisis ekonomi Amerika Serikat, Islandia merupakan negara pertama yang ekonominya runtuh oleh krisis dan mengalami krisis terparah pada 2008, hal ini yang kemudian memicu perubahan politik dalam negeri di Islandia (Id.routestofinance.com, 2008)

Jatuhnya tiga bank terbesar Islandia Landsbanki, Kaupthing dan Glitnir serta kegagalan Ketiga bank ini membayar hutang luar negeri sebesar \$62 miliar, membuat investor asing keluar dari Islandia yang menyebabkan hilangnya nilai mata uang krona sebesar 50 persen dalam satu minggu. Ketidakmampuan pemerintah mempertahankan nilai mata uang krona pada saat itu semakin memperparah kondisi perekonomian Islandia. Yang membuat warga negara turun ke jalan menuntut pengunduran diri presiden yang memimpin Dan menuntut pemerintah untuk segera mencari solusi lain untuk dapat terlepas dari hutang negara. (Executive Summary, 2010).

Menanggapi pergolakan yang terjadi di Islandia, banyak negara yang menyarankan agar Islandia bergabung dengan Uni Eropa dan mengadopsi Euro sebagai mata uangnya. Selain itu mencuatnya Isu untuk bergabung dengan Uni Eropa membuat masyarakat Islandia beranggapan bahwa apabila mereka bergabung dengan Uni Eropa maka mereka akan terselamatkan dari krisis yang terjadi. Asumsi ini sempat menjadi perdebatan antar masyarakat karena tidak semua rakyat pro terhadap Uni Eropa ada banyak pihak juga yang menentang apabila Islandia bergabung dengan Uni Eropa. (berdikarionline.com, 2012).

Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi negara Parlemen Islandia memutuskan untuk mengesahkan mosi terkait aplikasi untuk bergabung dengan Uni Eropa, dimana pada Juli 2009 secara resmi Islandia Mengajukan aplikasi permohonan ke Uni Eropa dengan maksud ingin menjadi anggota Uni Eropa. dibawah pemerintahan Perdana Menteri Johanna Sigurdardottir dari partai aliansi demokratik social dengan hasil suara 33 parlemen

setuju untuk bergabung, 28 suara parlemen menolak untuk bergabung dan 2 suara memilih abstain. (Tamara Kajtazovic, 2014).

Pada tahun 2010 Komisi Eropa secara resmi membuka negosiasi untuk merundingkan aplikasi permohonan Islandia Untuk bergabung dengan Uni Eropa. konferensi antar pemerintah diadakan pertamakali di Brussels pada 27 Juli 2010, negosiasi ditujukan untuk adopsi penuh Implementasi dan penegakan hukum Uni Eropa. disamping itu berdasarkan pendapat komisi Eropa, Islandia telah memenuhi kriteria ekonomi, maupun kriteria politik untuk menjadi anggota Uni Eropa. Bahkan 2/3 Undang-Undang Islandia sudah mengadopsi peraturan dan hukum Uni Eropa melalui perjanjian EEA sehingga peluang untuk diterima kedalam Uni Eropa sangat memungkinkan. (eeas.europa.eu, 2010).

Akan tetapi setelah tiga tahun berjalannya perundingan aplikasi Islandia ke Uni Eropa, pemerintahan Islandia berubah sikap pada Mei 2013 dan memutuskan untuk menarik aplikasi permohonan keanggotaannya dari Uni Eropa serta menghentikan seluruh perundingan untuk aksesi ke Uni Eropa. Padahal apabila Islandia bergabung dengan Uni Eropa kemungkinan besar peluang untuk diterima kedalam Uni Eropa sangat besar karena Islandia sudah memenuhi hampir seluruh syarat- syarat dasar seperti kriteria kopenhagen dan sebagian besar kerangka peraturan Acquis Communautaire yang ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai syarat utama menjadi anggota. Warga Islandia sempat memprotes keputusan pemerintah karena dilakukan tanpa referendum, meskipun pada akhirnya referendum tidak dilakukan dan Islandia memilih untuk membekukan proposal pada tahun 2013. Pemerintah bersikeras bahwa kepentingan mereka akan lebih baik berada diluar blok Uni Eropa pada saat itu, akhirnya pada tahun 2015 secara resmi pemerintah Islandia menarik aplikasi permohonannya melalui sebuah surat kepada komisi Eropa dan menghentikan semua perundingan yang berkaitan dengan aksesi ke Uni Eropa. (euractiv.com, 2017).

Kerangka Teori

Decision Making Theory

Kebanyakan dari kebutuhan dan keinginan manusia tidak dapat dipenuhi tanpa suatu tindakan dan pada umumnya hal ini didahului oleh suatu keputusan, yang berarti suatu tindakan kemauan didalam pikiran seseorang yang menentukan jalannya tindakan yang akan diambil atau dapat dikatakan sebagai suatu interaksi antara pembuat keputusan dan lingkungannya, Selain itu kebijakan luar negeri suatu negara merupakan keputusan yang telah dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatur hubungan suatu negara dengan negara lain. keputusan ini merupakan suatu bentuk tindakan atau kebijaksanaan dalam hubungan dengan suatu aktor dan wilayah-wilayah yang berada di negara lain sehingga menimbulkan suatu aksi berupa kebijakan yang mengatur jalannya hubungann antar negara satu dengan negara lainnya, dalam interaksi ini setiap negara berusaha menegakkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya (J. Frankel, 1991),

Robert Keohane & Joseph Nye mengemukakan bahwa para Ilmuan dan para praktisi politik internasional telah memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah hubungan antarbangsa atau antarnegara, dalam konteks ini negara dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan dan kekuasaan yang bersifat otonom, negara merupakan unit dasar dalam politik luar negeri dari berbagai negara lain yang pada akhirnya membentuk sebuah pola

prilaku, Pola prilaku inilah yang mencerminkan Koneksitasnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan luar negeri suatu negara (P. Anthonius Sitepu, 2005).

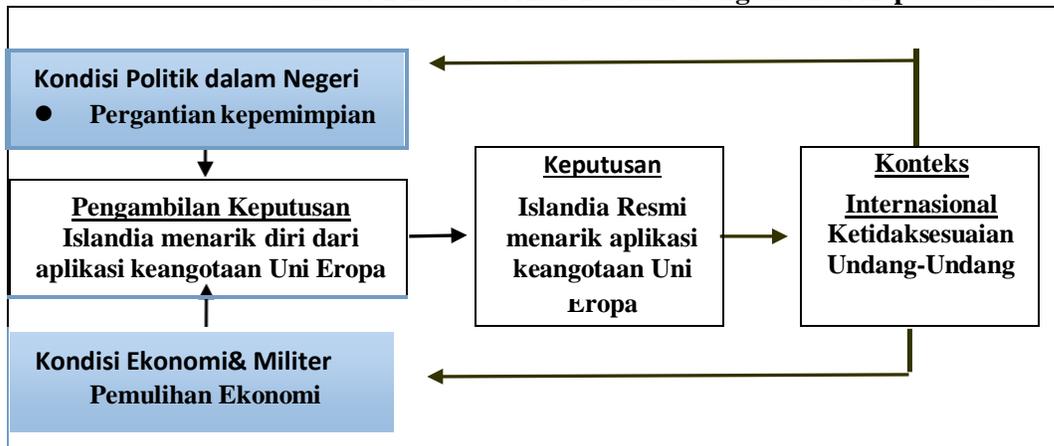
Sementara itu menurut William D. Coplin, untuk mengetahui mengapa suatu negara berperilaku sejalan dengan wilayah kepentingan mereka kita harus memahami mengapa atau apa yang memicu para pemimpin suatu negara membuat keputusan. Coplin juga menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambil bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi Politik Dalam Negeri, suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan keterbukaan sistem politik atau tingkat stabilitas dalam negeri yang dialami sistem itu sehingga membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu.

2. Kondisi Ekonomi dan Militer, Situasi ekonomi dan militer suatu negara berperan penting sebagai pemberi dukungan dan tuntutan kepada para pengambil keputusan

3. Kondisi Internasional, dalam membahas dampak konteks Internasional terhadap politik luar negeri suatu negara ada tiga elemen penting yang mempengaruhinya, yaitu; Geografis, Ekonomis dan politis, Lingkungan Internasional suatu negara terdiri dari wilayah yang didudukinya, dalam kaitannya dengan negara lain dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara lain.(William D. Coplin, terj Mercedes Marbun, 2003). Untuk mempermudah pola pikir dalam memahami rumusan masalah dalam penelitian ini maka disusun alur berfikir sebagai berikut:

Gambar 1 Ilustrasi Alur Berfikir Pengambilan Keputusan



Sumber : William D Coplin, pengantar politik Internasional: suatu telaah teoritis, terjemahan mercedes marbun.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif, yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori/hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder data yang didapat dengan menelusuri literatur, artikel dan buku maupun dari berbagai sumber terpercaya lainnya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif dimana persoalan yang ada digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan satu sama lainnya yang memiliki penjelasan serta keterkaitan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan konsep pembuatan keputusan milik William D. Coplin, yang mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan yaitu faktor dari dalam negeri suatu negara, kondisi ekonomi dan militer serta faktor konteks Internasional. Penulis menemukan ada dua Faktor yang mempengaruhi keputusan Islandia Menarik Proposal Keanggotaan Uni Eropa. 1.Faktor kondisi politik dalam negeri Islandia, 2. Faktor kondisi ekonomi Islandia

A. Kondisi Politik dalam Negeri Islandia

Islandia merupakan negara dengan sistem multi partai, sejak kemerdekaannya dan memiliki empat partai yang memiliki pengaruh besar di Islandia selain itu, Euroskepticism pada kenyataannya selalu mendominasi negara ini rasa takut kehilangan kedaulatan dan campur tangan UE dalam urusan internal membuat partai-partai Islandia sangat berhati-hati terhadap Isu keanggotaan Uni Eropa, hal ini dilihat sejak tahun 1990-an dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan pemerintah hanya sekitar 30% dari publik Islandia yang mendukung keanggotaan Islandia dalam Uni Eropa, sedangkan partai politik tak satupun yang mengakomodasi secara resmi keanggotaan Uni Eropa.(Aegisson Ragnar Gudbedgur)

Partai Social Demokrat Alliance (SDA), merupakan satu-satunya partai yang secara konsisten sejak 2001 merubah haluan politiknya menjadi Pro terhadap Uni Eropa, partai SDA percaya bahwa keanggotaan UE akan membawa ekonomi Islandia lebih baik daripada berada diluar Uni Eropa, meskipun SDA mengadvokasi Isu Uni Eropa namun tetap memilih untuk menahan diri agar tidak secara aktif berkempanye karena kurangnya dukungan pada saat itu. Hingga pada tahun 2008 Krisis Islandia menjadi satu-satunya peluang SDA menempatkan keanggotaan Uni Eropa sebagai agenda politiknya.(lihat gambar 6)

Gambar 6

Koalisi partai politik dan kebijakan politik terhadap Uni Eropa

Table 1. Governments, Prime Ministers and European Policies since 1988

Years	Political parties in government coalitions	Prime ministers (party)	European policies
1988-1991	Progressive Party (PP), Social Democratic Party (SDP), People's Alliance Citizens' Party	Hermansson (PP)	EEA negotiation (dispute on membership) - Not to apply for EU
1991-1995	Independence Party (IP), SDP	Oddsson (IP)	EEA membership - Not to apply for EU
1995-1999	IP, PP	Oddsson (IP)	Not to apply for EU - Schengen membership
1999-2003	IP, PP	Oddsson (IP)	Not to apply for EU - Schengen membership
2003-2004	IP, PP	Oddsson (IP)	Not to apply for EU
2004-2006	IP, PP	Asgrimsson (PP)	Not to apply for EU
2006-2007	IP, PP	Haarde (IP)	Not to apply for EU
2007-January 2009	IP, Social Democratic Alliance (SDA)	Haarde (IP)	Not to apply for EU
February-April 2009	SDA, Left Green Movement (LGM) (minority government tolerated by the PP)	Sigurðardóttir (SDA)	Not to apply for EU
Since May 2009	SDA, LGM	Sigurðardóttir (SDA)	EU application (dispute on membership)

:Sumber : Scandinavian Political Studies a journal published for the Nordic political Science Association hal 55

Partai Social demokrat alliance mengakhiri koalisinya dengan partai kemerdekaan pada Januari 2009, karena perbedaan kebijakan yang bertentangan. Dan membangun koalisi partai yang baru Leaf Green Party, pada pemilihan umum di Islandia dalam kampanyenya memfokuskan pada potensi bantuan pra akses Uni Eropa dan adopsi Euro. Untuk mencapai tujuannya partai SDA membangun sekutu dengan kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh di Islandia seperti federasi perdagangan dan jasa, federasi industri Islandia, konfederasi perburuhan Islandia dan membuat deklarasi untuk melihat seberapa besar dukungan untuk integrasi Uni Eropa, yang kemudian membawa kemenangan partai SDA di parlemen pada pemilu tahun 2009.

Ini merupakan pertamakalinya dalam sejarah Islandia dimana partai politik kedua terbesar memenangkan pemilihan untuk kampanye terbuka tentang Isu bergabung dengan Uni Eropa. Hasil pemilu juga mengindikasikan adanya dukungan dari parlemen Islandia terhadap keanggotaan Uni Eropa, parlemen Islandia yang disebut Althingi, menyetujui aplikasi keanggotaan Uni Eropa dengan 33 setuju, 28 yang menolak akses dan dua diantaranya memilih abstain di parlemen. (Thorhalsson Baldur et al 2011).

Dibawah kepemimpinan Johanna Sigurdardottir pemerintah Islandia segera mengumumkan bahwa akses ke Uni Eropa akan menjadi agenda politiknya sesuai janji selama kampanye pada masa pemilihan umum april 2009. Tak butuh waktu lama pada 16 Juli 2009 aplikasi diajukan kepada pemerintah Swedia yang saat itu memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa. Penyerahan proposal keanggotaan Uni Eropa oleh partai SDA ini pada akhirnya memicu perdebatan terbuka antara para elit di Islandia. Partai independence party sebagai partai oposisi dari SDA, sangat gigih dengan argumennya tentang peraturan Common Fisheries Policy yang akan merusak kontrol penangkapan ikan Islandia bila bergabung dengan Uni Eropa. Selain itu Islandia dianggap tidak akan dapat mengatur kebijakan perekonomiannya sendiri dengan mengadopsi Euro dan akan berdampak fatal bagi ekonomi negaranya, Islandia juga akan kesulitan membela kepentingannya karena ukurannya yang kecil diantara negara anggota Uni Eropa. (Azertag.az, 2009).

Partai IP merupakan partai politik yang paling berpengaruh di Islandia, sejak 1991 hingga 2009 sejak berdirinya Islandia sebagai republik partai IP menahan semua diskusi tentang keanggotaan UE didasarkan pada sikap Euroskeptis para elit politik negara tersebut yang sangat mendominasi sebelum terjadinya krisis pada 2008. Satu minggu sebelum pemilihan umum di Islandia, partai IP telah berupaya untuk menjangkau kembali para pemilih yang pro Eropa agar dapat memenangkan pemilu april 2009, dengan mengusulkan adopsi Euro secara unilateral namun pada akhirnya gagasan ini ditolak oleh brussel sebagai tuan rumah Uni Eropa dan menempatkan partai IP dalam kekalahan yang buruk dalam sejarahnya dengan menerima hanya 23.7 persen. Krisis ekonomi ini pada akhirnya menggulingkan pemerintahan yang bertahan sejak 1991 (Thorhalsson Baldur Op.Cit).

Partai Progressive party (progressive party) sejak tahun 2001 juga menjatuhkan klausul dalam manifesto partainya bertentangan dengan keanggotaan Uni Eropa, namun pada tahun 2007 partai ini juga mulai melunak dan pada 2008 kebijakannya banyak PP dipengaruhi sikap pro UE, dan mulai merubah kebijakannya dengan memungkinkan keanggotaan UE untuk mengadopsi mata uang Euro PP menjadi satu-satunya partai yang mengubah kebijakan formalnya terhadap proposal UE disebabkan oleh krisis ekonomi.

The Liberal Party (LP) sebelumnya sangat terbuka terhadap kemungkinan keanggotaan Uni Eropa namun pada pemilihan umum tahun 2009, LP bahwa Islandia tidak seharusnya bergabung dengan UE, tetapi harus mempertahankan kedaulatannya. Islandia harus berusaha menemukan sendiri jalan keluar dari krisis, dalam proposal ekonomi partai mengatakan bahwa Islandia harus mempertahankan ISK sebagai mata uang yang digunakan untuk pemulihan ekonominya bukan dengan mengadopsi euro. Namun program anti Uni Eropa partai LP ini pada akhirnya harus kalah dalam pemilihan april 2009 dan kehilangan semua dukungan suara yang berakibat pada keluarnya LP dari parlemen setelah bertahan selama 10 tahun. (Ibid hal 68).

Citizens Movement merupakan partai yang awalnya tidak membahas sama sekali tentang keanggotaan Uni Eropa, menariknya partai ini merupakan mewakili protes terhadap krisis keuangan dan keterlambatan pemerintah dalam mengatasinya. Namun kemudian setuju agar referendum harus dilakukan bila ingin mengadopsi euro atau pun bergabung dengan Uni Eropa setidaknya dua dari empat anggota parlemen dai partai Citizen Movement setuju bahwa Islandia memulai akses dengan Uni Eropa. Perdebatan antara anggota partai politik maupun antara para anggota parlemen dan kelompok kepentingan saling bersilang pendapat terkait akses keanggotaan Uni Eropa. Hingga pada suatu momentum adanya unsur baru dalam perdebatan yaitu sengketa Ice-save antara islandia dan Inggris serta belanda. Dalam debat publik di Islandia, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya dianggap telah memblokir bantuan IMF kepada Islandia untuk menghalangi pemulihan ekonominya. Islandia telah meminta pihak Uni Eropa membantu menyelesaikan perselisihan melalui keanggotaannya dalam EEA namun tetap tidak ada hasil yang pasti, Hal ini kemudian membuat Islandia mengangap bahwa Uni Eropa tidak mampu memberi perlindungan ekonomi dan politik meskipun menjadi anggota penuh dalam UE. (Ibid Hal 9).

Persoalan Ice-save yang tak kunjung selesai ini, Islandia terus menghadapi kemungkinan akan adanya veto dari belanda maupun Inggris terhadap akses ke Uni Eropa. Perdebatan Ice-save ini kemudian telah meningkatkan kembali perasaan nasionalis orang-orang Islandia sejak perasaan terkhiat oleh negara-negara tetangganya nordik sekitarnya yang dianggap bersama dengan Inggris dan belanda memblokir bantuan IMF, perdebatan kemudian berfokus pada pertanyaan apakah Islandia harus menarik atau melanjutkan akses ke Uni Eropa. (lihat gambar 7)

Gambar 7
Perubahan arah kebijakan pemerintah Islandia terhadap Uni Eropa

Table 2. Political Parties: Election Results, Numbers of MPs and European Policies since 2007*

Political parties	2007		2009		2010
	Election results % (MPs)	European policy	Election results % (MPs)	European policy	European policy
Independence Party	36.6 (25)	No EU	23.7 (16)	No EU	Withdraw EU application
Social Democratic Alliance	26.8 (18)	EU application	29.8 (20)	EU application	EU accession negotiations
Left Green Movement	14.3 (9)	No EU	21.7 (14)	No EU – but referendum on accession treaty	No EU – but accepts EU accession negotiations
Progressive Party	11.7 (7)	No EU	14.8 (9)	EU application subject to strict preconditions	Formally accepts EU accession negotiations but in practice favours withdrawal of EU application
Citizens' Movement			7.2 (4)	No formal policy but accepted EU application	Split on EU accession negotiations and withdrawal of application
Liberal Party	7.3 (4)	No EU	2.2 (0)	No EU	Withdraw EU application

Note: *According to formal policy stand in the general elections in April 2007 and 2009 and September 2010.

Sumber : Scandinavian Political Studies a journal published for the Nordic political Science Association hal 61

Opini publik terhadap keanggotaan Uni Eropa juga terpengaruh dengan perselisihan Ice-save jajak pendapat pada Juli 2010 menunjukkan 60 persen pemilih menentang keanggotaan Uni Eropa dan 26 persen mendukung serta 14 persen memilih abstain. Jajak pendapat dilakukan lagi pada bulan agustus di tahun yang sama dengan hasil 45 persen mendukung, 39 persen mendukung dan 16 persen memilih abstain. Penurunan yang cukup besar bila dibandingkan dengan jajak pendapat periode dua belas tahun yang menunjukkan hampir semua jajak pendapat menunjukkan mayoritas opini publik mendukung keanggotaan. ([Baldur Alyson Greham, 2012](#)).

Gerakan anti Uni Eropa mendapat kesempatan mengempanyekan pandangan anti Uni Eropa yang berpusat pada tiga tema, bila Islandia menerima keanggotaan Uni Eropa maka mereka akan kehilangan kemerdekaan dan kedaulatan serta kehilangan kendali atas sumber daya nasional yang paling berharga yaitu kontrol perikanan dan pertanian. Momen ini berhasil membawa pemerintah Euroskeptic kembali terpilih pada tahun 2013, dimana Perdana Menteri baru Jakobsdottir dari partai Green leaf berhasil menjabat setelah setuju untuk berkoalisi dengan Independen Party dan Centre Right Progressive party, partai ini secara terbuka dalam setiap kampanye bahwa partai tidak pernah setuju ataupun mendukung keanggotaan Uni Eropa.

Pasca kemenangan, dibawah pemerintahan Jakobsdottir Islandia kemudian memutuskan untuk menarik aplikasi perundingan yang telah berjalan selama kurang lebih empat tahun pada 2013 dan menarik proposal yang telah diajukan. Namun karena adanya gerakan protes dari rakyat Islandia yang menuntut untuk dilakukannya rederendum setelah pemerintah mengumumkan penarikan proposal keanggotaan Uni Eropa tanpa suara rakyat. Pemerintah memutuskan untuk menunda penarikan aplikasi selama dua tahun hingga pada 12 maret 2015 Islandia secara resmi menarik proposal keanggotaan Uni Eropa. ([The Guardian.com, 2015](#)).

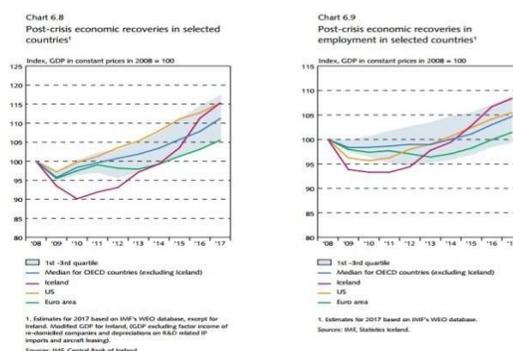
B. Kondisi ekonomi sebagai pertimbangan Islandia menarik proposal keanggotaan Uni Eropa

Erna Bjarnadottir perwakilan kepentingan asosiasi petani Islandia dan gerakan Euroskeptic Islandia dalam wawancara, “mengatakan bahwa gerakan pro-euro telah kehilangan momentumnya, pemulihan ekonomi sebagian besar telah berhasil di Islandia. Suara-suara yang menyerukan bergabung dengan euro telah menurun dari sebelumnya, pemerintah telah berusaha meminimalisir inflasi dan defisit anggaran negara”.

Menanggapi bencana ekonomi pemerintahan Islandia telah memulai serangkaian Inisiatif yang dirancang untuk menstabilkan nilai Krona mengurangi pengangguran dan mengurangi kontraksi ekonomi. Dalam menstabilkan nilai tukar mata uang Krona yang sebelumnya diperdagangkan hingga 202 per Eur 1 (satu Euro) menjadi 131 Krona per Eur 1 Saat otoritas Islandia tidak mampu lagi menjamin aset-aset bank yang ada, IMF kemudian datang memberikan suntikan dana sebesar \$ 2.1 miliar. Disusul Rusia juga memberikan suntikan dana USD 37 miliar ke bank-bank besar Islandia , Swedia memberikan dana USD 702 Juta, kemudian Skandinavia \$ 2.5 miliar yang kemudian digunakan pemerintah Islandia untuk memperkuat Krona dan menopang bank-bank yang telah dinasionalisasikan pada saat krisis. . ([Nuh Mohammad 2008](#)).

Dampak krisis terhadap perekonomian Islandia jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sebagian negara-negara maju lainnya seperti negara-negara United States dan negara-negara di zona Euro, namun pemulihannya juga tergolong sangat cepat.

Gambar 8
Perbandingan kecepatan pemulihan ekonomi Islandia dengan sebagian negara maju dan penurunan jumlah pengangguran.



Sumber left: IMF, Central bank of Iceland

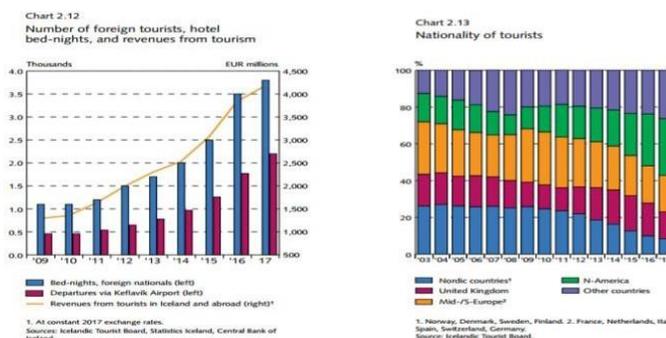
Grafik kiri menunjukkan kecepatan pemulihan Islandia diantara negara-negara anggota OECD dan grafik kanan adalah pemulihan pekerjaan di negara-negara anggota OECD. Garis merah melambangkan Islandia yang berada diperingkat paling atas setelah berada diposisi terendah, garis kuning adalah amerika serikat dan garis hijau adalah negara-negara zona Euro

Perekonomian Islandia mulai pulih pada triwulan II 2010 seiring dengan meningkatnya permintaan sektor swasta domestik dan pertumbuhan ekspor yang memperoleh momentumnya karena kondisi kompetitif yang ikut membaik dengan nilai tukar riil lebih rendah. Kondisi ekonomi Islandia telah sangat berubah selama beberapa tahun setelah krisis. NIIP Islandia telah meningkat pada periode pasca krisis, dikarenakan surplus perdagangan yang besar, aset revaluasi dan restrukturisasi hutang. posisi hutang luar negeri Islandia telah berbalik menjadikan Islandia kreditor bersih yang diakui dunia. (Central bank of Iceland, 2018).

Pada tahun-tahun sebelum krisis, sebagian PDB Islandia berasal dari kegiatan pasar keuangan, layanan domestik, dan ekspor perikanan. dan pada masa pemulihan ekonomi Islandia kontribusi terbesar berasal dari sektor yang dapat diperdagangkan dan layanan domestik serta pariwisata juga berperan besar terhadap pemulihan perekonomian Islandia. Ketika kondisi ekonomi terus membaik, dibantu oleh pemerintah pengeluaran yang besar saat terjadi krisis telah diperoleh kembali pada tahun 2015. PDB perkapita telah tumbuh sebesar 20% faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi adalah industri pariwisata yang berkembang pesat jumlah pengunjung asing ke Negara itu naik dari 470.000 pada 2008 menjadi 2.3 juta pengunjung pasca krisis. Pariwisata telah melonjak selama beberapa tahun. Peningkatan jumlah wisatawan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi, pendapatan devisa yang dihasilkan oleh pariwisata pada tahun 2013 skitar 26% dan naik

hingga 42% dari total ekspor. Sejak tahun 2010-2016 pendapatan operasional dalam pariwisata terus naik sekitar 76% secara riil, selain itu jumlah karyawan dibidang pariwisata meningkat dua kali lipat sehingga mengurangi dampak pengangguran. (Ibid)

Gambar 9
Peningkatan pariwisata Islandia dan nationality of tourist



Source: Islandia Central Bank

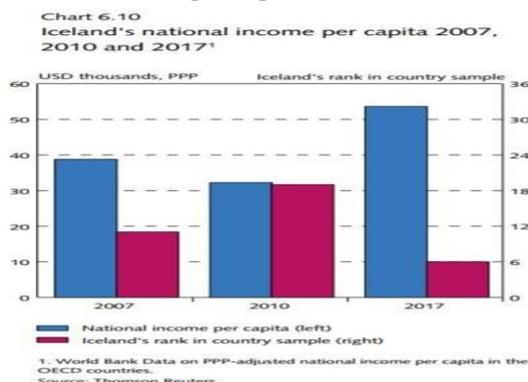
Kotak biru gambar kiri melambangkan tempat penginapan para turis Islandia maupun turis asing dan kotak merah gambar kiri peningkatan keberangkatan para turis melalui bandara Keflavik sedangkan warna kuning gambar kiri menggambarkan tingginya pendapatan Islandia dari sektor pariwisata. Dalam hal ini grafik kanan menjelaskan tentang asal para turis dari berbagai negara yang masuk ke Islandia.

Perkembangan berbagai sektor memiliki dampak ekonomi secara luas, pekerjaan dalam sektor jasa dan memberi rumah tangga, memberi dorongan besar dalam pendapatannya. Jumlah wisatawan juga berperan penting dalam peningkatan investasi, faktor penting lainnya adalah peningkatan keseluruhan dalam hal perdagangan ekspor luar negeri yang telah meningkatkan kemakmuran ekonomi Islandia.

Pada tahun sebelum krisis sektor perikanan sempat menurun sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan di sektor lain, seperti industri keuangan dan aluminium tetapi kemudian pasca terjadinya krisis 2008, Kepentingan relatif dari industri perikanan telah bangkit kembali. Dalam beberapa tahun sektor perikanan telah menyumbang sekitar 6,8% dari total PDB negara itu dan di tahun 2009 sektor perikanan menurun 5.8% dari total PDB tetapi kemudian 2010 meningkat hingga 31.3% dari total ekspor produk laut. Kontribusi perdagangan Internasional Islandia sebagian besar diekspor ke Eropa Barat dan Inggris menjadi negara yang menerima sebagian besar produk seperti ikan Cod yang merupakan ikan yang paling berharga saat itu dan telah menyumbang sekita 35% dari total nilai ekspor laut. (Haflidadottir Helga, 2011).

Gross Nationa Income (GNI) perkapita Islandia pada tahun 2007 berada di peringkat kesebelas diantara 36 negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), dan pada saat terjadi krisis Tahun 2008 GNI Islandia turun menempati posisi peringkat ke sembilan belas merupakan lever terendah menurut standar peringkat Islandia kemudian setelah krisis pemulihan terjadi dengan naiknya GNI Islandia menempati peringkat ke enam di antara negara OECD

Gambar 10
Rank GNI per-kapita Islandia in OECD



Source : Iceland Central Bank (ICB)

Grafik diatas menunjukkan betapa kuatnya dampak krisis pada saat itu dibandingkan Negara Negara maju lainnya pada saat itu. Dapat dilihat Kotak berwarna biru menunjukkan National Income per capita dimana pada tahun 2007 hingga 2010 mengalami penurunan yang signifikan dari peringkat ke-11 turun sebanyak 8 peringkat. Tetapi pasca pemulihan ekonomi peringkat GNI Islandia kembali naik sebanyak 13 peringkat, jauh diatas GNI sebelum terjadinya krisis.

Sektor teknologi dan komunikasi (TIK) juga mengalami peningkatan, tahun 2010 hingga 2016, pendapatan operasional dari industri TIK meningkat sekitar 50% secara riil. Kurang lebih 100 perusahaan dengan berbagai ukuran yang aktif di sektor perangkat lunak di bidang Teknologi dan komunikasi, permainan komputer, logistik dan operasi sistem manajemen telah meningkat sekitar 50% sejak 2013. Telekomunikasi Islandia juga luas menjangkau semua bagian negara, dengan sistem penggunaan ponsel mencapai 98% dari total penduduk Islandia.

Kecepatan Islandia untuk bangkit dari keterpurukan ekonominya merupakan sebuah prestasi, negara kutub kecil yang jatuh begitu dalam krisis keuangan dapat bangkit hanya dalam beberapa tahun setelah melewati berbagai proses yang akhirnya membawa Islandia pulih dengan cepat. Hal ini pada akhirnya membawa keputusan Islandia menarik proposal keanggotaannya dari Uni Eropa, saat zona Euro tidak lagi menjadi prioritas. (Central Bank of Iceland Op.Cit)

Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana prespektif orang-orang Islandia terhadap Uni Eropa, yang kemudian mempengaruhi sikap Islandia terhadap Uni Eropa. Negara ini sangat konsisten membatasi interaksinya dengan Uni Eropa sejak Negara ini merdeka, hampir tidak pernah sekalipun terpikirkan untuk akses ke Uni Eropa. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan panjang tentang kerjasama yang berkaitan dengan Uni Eropa antara para elit politik dan warga negaranya yang dimulai sejak 1957 hingga 2010. Sikap Euroskepticism sangat mendominasi di Negara ini, orang-orang Islandia sangat menghargai kedaulatan negara sebagai Identitas nasionalnya sehingga wacana bergabung dengan Uni Eropa secara penuh hampir tidak pernah dibahas. Sebab bergabung dengan Uni

Eropa dianggap sama saja dengan menyerahkan sebagian besar kedaulatan suatu Negara kepada Uni Eropa, sehingga rasa khawatir tentang kehilangan Identitas nasional membuat Negara ini skeptis terhadap Uni Eropa.

Islandia telah terhubung dan bekerjasama dengan organisasi internal Eropa melalui EFTA dan EEA, dikarenakan keanggotaan Islandia dalam EEA dinilai cukup untuk memenuhi kepentingan Islandia, seperti akses ke pasar tunggal tanpa harus terikat dan menyerahkan kontrol Negara seperti di dalam Uni Eropa. Hal ini yang membawa Islandia tetap mempertahankan kerjasamanya dengan EEA pada saat itu.

Krisis keuangan Global yang dimulai dari jatuhnya Lehman Brother hingga merambat ke Islandia pada 2008 membuat sikap Islandia berubah terhadap Uni Eropa, meskipun hanya sebentar akhirnya Islandia memutuskan untuk mengajukan proposal akses ke Uni Eropa untuk pertama kali pada 2009 setelah lebih dari 50 tahun perdebatan yang panjang. Hal ini merupakan sejarah baru dalam politik Islandia, Krisis keuangan yang merambat hingga ke Islandia dengan jatuhnya tiga bank besar Kaupthing, Glitnir dan Landsbanki membawa perekonomian Islandia semakin memburuk yang pada akhirnya membawa Islandia harus mencari perlindungan untuk mengatasi gejolak ekonominya.

Tetapi selama perundingan berjalan Islandia dapat mengatasi krisis dinegaranya dengan kekuatan nasionalnya sendiri sehingga rasa nasionalisme untuk mempertahankan Identitas nasional kembali menjadi tumpuan utama Negara ini. Akhirnya pada tahun 2013 Islandia menghentikan seluruh perundingan tentang akses keanggotaan dan memutuskan untuk menarik proposal secara resmi pada tahun 2015.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa alasan mengapa Islandia akhirnya menarik proposal keanggotaan Uni Eropa:

1. Adanya pergantian pemerintahan yang memimpin, menjadi alasan mengapa pada akhirnya Islandia menarik Proposal akses padahal peluang diterimanya sangat besar. Hal ini dikarenakan tahun pengajuan proposal pada 2009 Islandia dipimpin oleh pemerintahan baru dari partai Social Democrat Alliance yang merupakan satu-satunya partai yang konsisten mengempanyekan tentang keanggotaan Uni Eropa. Setelah SDA memecah koalisinya dari partai IP yang terkenal dengan sikap anti Uni Eropa dan berubah berkoalisi dengan partai Leaf Green Movement yang kemudian membawa aplikasi ini diajukan. Tetapi Kemudian pada tahun 2013 pemerintahan Islandia kembali berganti dibawah pimpinan Jakobsdottir dari partai green leaf. Partai ini merupakan partai yang menentang gagasan tentang Uni Eropa sehingga dengan kemenangan pemerintahan yang baru Islandia memutuskan untuk menarik dan membatalkan proposal.

2. Pemulihan ekonomi juga menjadi alasan mengapa akhirnya Islandia menarik proposal keanggotaan dari Uni Eropa, memburuknya perekonomian akibat krisis pada tahun 2008 membuat Negara ini mau tidak mau harus mencari tempat perlindungan yaitu dengan mengajukan proposal akses ke Uni Eropa. Tetapi kemudian Islandia berhasil keluar dari zona krisis dan perekonomian Negara mulai membaik sejak 2013 yang membawa Islandia pada keputusan untuk menarik kembali proposal keanggotaannya.

Daftar Pustaka

- Aplikasi Islandia untuk Eropa keanggotaan Serikat pekerja dalam
<http://uni.hi.is/baldurt/files/2012/08/iceland-EU-Baldur-Alyson-Graham.pdf> . 2012
- Baldur Thorhallsson and rebhan christian, “*Iceland’s economic crash and Integration*” 2011
- Causes of the Icelandic banks-responsibility, mistakes and negligence*. Diakses dari
[Https://www.rna.is/media/Skjol/RNAvefurkafli21enska.pdf](https://www.rna.is/media/Skjol/RNAvefurkafli21enska.pdf)
- Economy of Iceland chapter 6 ten years later Iceland Crisis and Recovery central bank of Iceland*, diakses di [Http://www.cb.is](http://www.cb.is). 2018
- EEA Agreement*, diakses dari <http://www.efta.int/eea/eea-agreement>
- Economy of Iceland chapter 6 ten years later Iceland Crisis and Recovery central bank of Iceland* dalam [Http://www.cb.is](http://www.cb.is)
- Frankel. J, “Hubungan Internasional” Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Haflidadottir Helga, “*The European union’s common Fisheries policy and the Icelandic Fishery Management system*” 2011
- Hilmarrsson Hilmar, “*Iceland and economic integration in or outside the Europeasn union*”. dalam
https://www.researchgate.net/publication/318021828.Iceland_and_economic_integration_in_or_outside_the_europeasn_union
- Iceland tempted once more by EU membership bait*, dalam
<http://www.euractiv.com/section/enlargement/news/Iceland-tempted-once-more-by-eu-membership-bait>
- Iceland’s accession negotiations with the EU*, dalam
[Http://eeas.europa.eu/archives/delegations/Iceland/eu_Iceland/Iceland_road/index_en.htm](http://eeas.europa.eu/archives/delegations/Iceland/eu_Iceland/Iceland_road/index_en.htm)
- Iceland Drops EU membership bid: interests better served outside union dalam
[Https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2015/mar/12/iceland-drops-european-union-membership-bid](https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2015/mar/12/iceland-drops-european-union-membership-bid)
- Iceland Ekonomi: kebangkrutan dan krisis keuangannya*, dalam
<https://id.routestofinance.com/Iceland-economy-its-bankruptcy-and-finance-crisis>
- Nuh Mohammad, memahami krisis Global –bagaimana harus bersikap?, Jakarta.2008
- P. Anthonius Sitepu, “*Studi Hubungan internasional*” .Yogyakarta: Graha Ilmu 2005
- Revolusi Islandia yang tak disiarkan-berdikari online*, dalam
<http://www.berrdikarionline.com/revolusi-Islandia-yang-tak-disiarkan/>
- Sukmika Mardalena & Indra Pahlawan,” Kepentingan ekonomi politik Islandia mempertahankan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa melalui perjanjian European Economic Area(EEA)” vol.2 No.2, Oct 2015
- Thorhallsson Baldur and Rebhan Christian.” *Iceland’s Economic Crash and Integration Takroff; an end to European union Scepticism*” 2011
- Tamara Kajtazovic, “*EU Enlargement: the case of Iceland and the Implications for the western Balkans*”. Vol. 6 No. 2(11), Oct 2014,
- William D Coplin, “*pengantar politik Internasional: suatu telaah teoritis*, Terj Marsedes Marbun” Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003